

POLITIK KAUM SANTRI DALAM SEJARAH INDONESIA

Suhermanto Ja'far

IAIN Sunan Ampel Surabaya

suhermanto.jafar@gmail.com

Abstract

This article is a historical analysis about the politics of *santri*. The role and involvement of *santri* in politics is not a new phenomenon, although the quality and quantity in each political episode is different, but the process and dynamics of Indonesian politics, can not be separated from the involvement of *santri*. This position is in line with the actual political map of Indonesia. The involvement of *santri* can describe in four times of the history of Indonesia, namely the pre-independence era, the early of independence until the end of the old order, the new order, and reform era. The fourth periodicity are used to read and analyze the tides of gait of *santri* in the political world.

Keywords: Santri, politics, pre-independence, old order, new order, reformation era

Abstrak

Tulisan ini adalah analisis historis tentang politik kaum santri. Peran dan keterlibatan kaum santri dalam dunia politik bukan fenomena baru. Meskipun kualitas dan kuantitasnya dalam setiap episode politik berbeda-beda, namun proses pewarnaan politik Indonesia tidak lepas dari keterlibatan kaum santri. Posisi seperti ini sesungguhnya sejalan dengan peta politik Indonesia. Keterlibatan kaum santri dapat diteropong dari empat masa perjalanan sejarah Indonesia, yaitu, masa pra-kemerdekaan, masa awal kemerdekaan hingga berakhirnya orde Lama, masa orde baru, dan masa orde reformasi. Empat periodisasi tersebut digunakan membaca dan menganalisa tentang pasang-surut dari kiprah kaum santri di dalam dunia politik.

Kata kunci: Santri, politik, pra-kemerdekaan, ORLA, ORBA, era reformasi

Pendahuluan

Sejak masa kolonialisme, Islam sudah memainkan peran yang sangat menentukan dalam berjuang menentang kolonialisme Belanda dan menuntut kemerdekaan bangsa. Seperti dicatat oleh para pengkaji nasionalisme Indonesia, Islam berfungsi sebagai mata rantai yang menyatukan rasa persatuan nasional guna menentang kolonialisme Belanda. "Agama Muhammad," tulis George McTurnan Kahin dalam karyanya, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, sebagaimana dikutip Bachtiar Effendi, bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat tali persatuan, tapi juga merupakan simbol kesamaan nasib (*in group*) untuk menentang penjajah asing dan penindas yang berasal dari agama lain. Sejarah mencatat bahwa Sarekat Islam (SI), yang didirikan pada tahun 1911, merupakan partai politik pertama yang didirikan di Indonesia. Bermula dari sebuah 'organisasi dagang', Serikat Dagang Islam (SDI), yang didirikan oleh H. Samanhoedi di Solo pada tahun 1911, SI kemudian berkembang pesat menjadi sebuah "organisasi politik" nasional pertama di Indonesia.

Memang, pada awalnya, pendirian SI dilatarbelakangi adanya persaingan bisnis antara orang-orang pribumi muslim dan golongan Cina (Shirasi, 1997:47). Tetapi, di dalam anggaran dasarnya dijelaskan bahwa perkumpulan ini berusaha memajukan perdagangan, memberikan pertolongan kepada anggota yang mengalami kesulitan, memajukan kepentingan jasmani dan rohani penduduk asli serta memajukan kehidupan agama Islam (Karim, 1983:19). Jadi, sejak awal berdirinya, SI telah bersinggungan dengan dunia politik yang ada pada saat itu. Sosok politik SI semakin terlihat ketika ia berada di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto pada tahun 1912. Namun, sangat disayangkan bahwa posisi SI yang tengah menjulang dan memegang peranan penting dalam pergerakan nasional Indonesia itu kemudian tidak dapat dipertahankan lagi, terutama di penghujung tahun 1920-an. Pada tahun-tahun berikutnya, idealisme dan aktivisme politiknya dibayangkan oleh kelompok-kelompok sosial-politik lain yang tidak

secara formal menyatakan Islam sebagai dasar ideologinya (Noer, 1978: 119-126).

Ada dua aliran politik yang muncul ke permukaan ketika itu, aliran politik Islam dan aliran pemisahan negara dan agama. Pada satu pihak, kelompok pendukung dasar Islam dalam BPUPKI ingin melaksanakan seluruh isi syari'at yang telah tersedia, tanpa suatu reformulasi tuntas dengan menghubungkannya pada ajaran etik al-Qur'an sebagaimana yang dipahami dalam waktu sekarang ini. Formulasi sistematis ini diperlukan agar hukum-hukum Islam mampu menghadapi persoalan-persoalan modern yang dihadapi manusia. Di pihak lain, kelompok nasionalis sekuler tampaknya hanyalah ingin mengurung Islam dalam sebuah sangkar 'urusan pribadi' seorang muslim. Debat tentang ini telah mewarnai perjalanan sejarah modern Indonesia, tapi sebuah penyelesaian mendasar belum lagi ditemukan: apakah dalam bentuk Islam Qur'ani atau sekularisme? (Ma'arif, tt:107). Isu tentang dasar negara telah memaksa para pendiri republik Indonesia untuk menjalani masa-masa yang sulit dalam sejarah modern Indonesia.

Akhirnya, sebuah kompromi politik dalam bentuk Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dapat dicapai. Menurut Muhammad Yamin, seperti dikutip oleh A. Syafi'i Ma'arif, Piagam Jakarta itu sebenarnya adalah sebuah *Preamble* bagi konstitusi yang diajukan dalam sidang BPUPKI. Di dalamnya, Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati; tapi sila pertama, yaitu sila Ketuhanan diikuti oleh klausul: ... *dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya* (Ma'arif, tt: 107).

Kalangan pesantren yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan *Taswirul Afkar* atau dikenal juga dengan "*Nahdlatul Fikri*" (kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Dari sini

kemudian didirikan *Nahdlatut Tujjar* (Pergerakan Kaum Saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatut Tujjar* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamakan Komite Hejaz, yang diketuai oleh K.H. Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga saat ini di Mekkah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan *ad hoc*, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama *Nahdlatul Ulama* (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 M. Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Sejarah politik kaum santri NU pada masa-masa awal setidaknya menampilkan tiga sosok kiai yang sangat besar pengaruhnya dalam konteks politik bangsa maupun perjalanan organisasi NU itu sendiri. Ketiga kiai itu adalah KH M Hasyim Asy'ari, KH A Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri. Kiai Hasyim adalah sosok kiai yang mampu memberi makna pada politik yang kelihatannya bersifat duniawi dalam spirit teologis. Kiai Hasyimlah yang memelopori keluarnya fatwa

bahwa negara Hindia Belanda adalah "wilayah Islam" dan status NKRI yang diproklamasikan Soekarno-Hatta adalah sah menurut pandangan Islam. Karena itu, mempertahankan kemerdekaan bukan saja bagian dari kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi juga kewajiban agama bagi para pemeluk Islam.

Masa Kemerdekaan Hingga Berakhirnya Orde Lama

Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945 telah memberikan kesempatan yang sama kepada berbagai aliran politik di Indonesia untuk dengan bebas membentuk partai-partai politik sebagai sarana demokrasi seperti yang dinyatakan oleh pasal 28 UUD 1945. Tidak ketinggalan adalah lahirnya partai politik Islam, yaitu Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang berbeda dengan Masyumi buatan Jepang, karena ia dibentuk dan didirikan oleh umat sendiri tanpa campur tangan pihak luar, sekalipun nama lama tetap dipakai. Partai ini adalah partai gabungan yang didukung oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perikatan Umat Islam dan Persatuan Islam (Noer, 1987:49-50). Tetapi seakan sudah menjadi kultur lama bahwa Islam Indonesia pada umumnya terpecah menjadi dua kelompok, Islam tradisional dan modernis. Perpecahan ini telah berlangsung cukup lama dan lebih berhubungan dengan masalah perbedaan pemahaman atas Islam ketika berhadapan dengan kultur lokal daripada perbedaan ideologi politik.

Dalam hal ideologi politik, kedua kelompok tersebut sama-sama menginginkan Islam menjadi ideologi negara. Hal ini bisa dilihat dalam perdebatan konstituante, di mana kelompok tradisional dan modernis bersatu untuk memperjuangkan Islam melawan kelompok nasionalis. Tetapi pada saat yang sama, kedua kelompok itu pun saling bertarung dalam memperebutkan kursi kekuasaan. Konflik politik keduanya terlihat jelas ketika NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952, yang penyebab langsungnya adalah "direbutnya" jabatan menteri agama yang sekian lama menjadi "milik" NU oleh faksi modernis di Masyumi. Sebelum itu, PSII (Partai Sarekat Islam

Indonesia, yang dulunya bernama SI) juga telah keluar dari Masyumi pada tahun 1947 (Ma'arif, tt: 117). Jadi, sebetulnya kelompok Islam memiliki ideologi politik yang sama, tetapi sebagai dua kelompok yang berbeda, mereka memiliki persaingan politik yang didasarkan atas kepentingan kelompok. Kesatuan ideologis inipun samar-samar masih terlihat ketika kedua kelompok tersebut berada dalam rumah partai yang sama, yakni PPP (Partai Persatuan Pembangunan) pada tahun 1970-an.

Orde lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional, dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, orde lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di antaranya, adalah terjadinya pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1948, berlangsungnya demokrasi terpimpin, adanya pelaksanaan UUD Sementara pada tahun 1950, gerakan Nasakom dan pemberontakan PKI jilid II pada tahun 1965.

Sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Wujud berbagai hambatan adalah adanya disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode orde lama yang berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September 1945, sampai lahir Supersemar sebagai titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era orde baru yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik orde lama di mana masih terlihat kentalnya mekanisme, fungsi, dan struktur politik yang tradisional berlandaskan ideologi-sosialisme-komunisme.

Konfigurasi politik yang ada pada periode orde lama membawa bangsa Indonesia berada dalam suatu rezim pemerintahan yang otoriter dengan berbagai produk-produk hukum yang konservatif dan pergeseran struktur pemerintahan yang lebih sentralistik melalui ketatnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pada masa ini pula, politik kepartaian sangat mendominasi konfigurasi politik yang terlihat melalui revolusi fisik serta sistem yang otoriter sebagai esensi feodalisme.

Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya berupa pembubaran konstituante, diundangkan dengan resmi dalam Lembaran Negara tahun 1959 No. 75, Berita Negara 1959 No. 69 berintikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya konstituante dalam melaksanakan tugasnya. Pada masa ini Soekarno memakai sistem *Demokrasi Terpimpin*. Tindakan Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 dipersoalkan keabsahannya dari sudut yuridis konstitusional, sebab menurut UUDS 1950 Presiden tidak berwenang “memberlakukan” atau “tidak memberlakukan” sebuah UUD, seperti yang dilakukan melalui dekrit.

Sistem ini yang mengungkapkan struktur, fungsi dan mekanisme, yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem “*trial and error*” yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi, bahkan diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang begitu cepat berkembang. Maka problem dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berkembang pada waktu itu bukan masalah-masalah yang bersifat ideologis politik yang penuh dengan norma-norma ideal yang benar, tetapi masalah-masalah praktis politik yang mengandung realitas-realitas objektif serta mengandung pula kemungkinan-kemungkinan

untuk dipecahkan secara baik, walaupun secara normatif ideal kurang atau tidak benar.

Bahkan kemudian muncul penamaan sebagai suatu bentuk kualifikasi seperti “Demokrasi Terpimpin” dan “Demokrasi Pancasila”. Berbagai “eksperimen” tersebut ternyata menimbulkan keadaan “*excessive*” (berlebihan) baik dalam bentuk “Ultra Demokrasi” (berdemokrasi secara berlebihan) seperti yang dialami antara tahun 1950-1959, maupun suatu kediktatoran terselubung (*verkapte diktatuur*) dengan menggunakan nama demokrasi yang dikualifikasi (*gekwalficeerde democratie*).

Sistem “*trial and error*” telah membuahkan sistem multi ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi mayoritas, keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan DI/TII yang berhaluan *theokratisme* Islam fundamental (1952-1962) dan kemudian pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran politik ke sistem catur mayoritas. Kenyataan ini berlangsung selama 10 tahun dan terpaksa harus kita bayar tinggi berupa: 1) gerakan separatis pada tahun 1957; dan 2) konflik ideologi yang tajam yaitu antara Pancasila dan ideologi Islam, sehingga terjadi kemacetan total di bidang Dewan Konstituante pada tahun 1959.

Oleh karena konflik antara Pancasila dengan *theokratis* Islam fundamentalis itu telah mengancam kelangsungan hidup negara Pancasila 17 Agustus 1945, maka terjadilah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan tujuan kembali ke UUD 1945 yang kemudian menjadi dialog nasional yang 'seru' antara yang pro dan yang kontra. Yang pro memandang dari kacamata politik, sedangkan yang kontra dari kacamata yuridis konstitusional. Akhirnya, masalah Dekrit Presiden tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah orde baru, sehingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kelak dijadikan salah satu sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pada perang revolusi yang berlangsung tahun 1960-1965, yang sebenarnya juga

merupakan prolog dari pemberontakan Gestapu/PKI pada tahun 1965, telah memberikan pelajaran-pelajaran politik yang sangat berharga walau harus dbayar dengan biaya tinggi.

Kiprah Politik Kaum Santri

Di zaman revolusi kemerdekaan, NU mengerahkan kekuatan berupa *political power* dengan membentuk tiga kelompok barisan jihad: *Barisan Hisbullah* dipimpin H. Zainul Arifin, *Barisan Sabilillah* dipimpin oleh KH. Masykur, dan *Barisan Mujahidin* dipimpin oleh KH. A. Wahab Hasbullah. Tiga kekuatan ini bersama komponen kekuatan lainnya bersepakat untuk maju ke garis depan untuk menghadapi kekuatan militer Belanda yang berupaya kembali ke Indonesia.

Klimaksnya, NU mengumandangkan Resolusi Jihad oleh Rais Akbar Syuriah PBNU KH. Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945, yang mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk melakukan jihad, mengangkat senjata melawan Inggris (sekutu) yang disusupi oleh tentara NICA (Belanda). Resolusi jihad ini mampu mematahkan perlawanan sekutu yang ingin menguasai Kota Surabaya. Peristiwa ini menimbulkan gugurnya *syuhada-syuhada* di medan tempur di Surabaya, pada tanggal 10 November 1945. Namun sayang sekali, dokumen sejarah nyaris terlupakan oleh bangsa Indonesia.

Dalam percaturan politik, meski pada awal kemerdekaan umat Islam memiliki berbagai wadah saluran politik, seperti NU, PSII, PERSIS, Muhammadiyah, dan Perti, namun umat Islam sepakat membentuk wadah tunggal sebagai sarana perjuangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi politiknya. Wadah tersebut adalah Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Kesepakatan ini diambil berdasarkan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) di Yogyakarta tanggal 7–8 Nopember 1945, di mana terdapat dua keputusan penting, yaitu: 1) Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia; dan (2) Partai Islam di luar Masyumi keberadaanya tidak diakui.

Sejalan dengan dikembangkannya sistem demokrasi liberal oleh pemerintah orde lama, maka keberadaan Masyumi sebagai

wadah tunggal aspirasi politik umat Islam mengalami goncangan. Goncangan pertama terjadi pada bulan Juli 1947, yaitu dengan keluarnya unsur PSII dalam Masyumi. Goncangan yang paling dahsyat bagi Masyumi terjadi setelah NU mengikuti jejak PSII untuk meninggalkan Masyumi berdasarkan keputusan Mukhtamar NU di Palembang pada tanggal 29 April 1952. Keputusan NU ini kemudian disusul oleh Perti. Dari sinilah awal kiprah kepartaian NU yang dilakukan secara mandiri.

Periode antara tahun 1952-1955 merupakan masa perluasan dan konsolidasi partai baru ini. Dengan komitmen pada aktivitas politik, maka sekarang keberadaannya banyak tergantung pada pencapaian perolehan suara dalam pemilu pertama yang dijadwalkan pada bulan September 1955. NU boleh berbangga bahwa 70% anggota Masyumi merupakan anggota NU dan para simpatisannya saat itu juga menarik dukungan mereka terhadap Masyumi. Akhirnya, pada pemilu pertama tersebut, NU muncul sebagai partai ketiga terbesar, dengan menarik hampir 7 juta atau 18,4 % dari total suara nasional serta mendongkrak perwakilan di parlemen dari 8 orang (ketika masih berada di Masyumi) menjadi 45 orang. Kemenangan ini tentu saja melahirkan luapan kegembiraan bagi warga *Nahdhiyyin*, karena mereka merasa beratnya harapan dalam pertarungan tersebut, terlebih panitia pemenangan pemilu NU sendiri punya prediksi hanya akan memperoleh 20–25 kursi saja. Demikian juga halnya dengan susunan kabinet berdasarkan hasil pemilu 1955 tersebut, NU mampu mendudukkan 5 orangnya dalam kabinet, sama dengan Masyumi, sementara dari PSII 2 orang dan Perti 1 orang.

Yang jelas, selama NU berkiprah di panggung politik praktis pada era orde lama, ternyata banyak prestasi yang disandangnya, diantaranya adalah: *pertama*, penyelenggaraan pemilu pertama diserahkan kepada sebuah panitia pemilu yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil partai politik. Jadi, tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Hal yang demikian dikenang dan dicatat oleh sejarah sebagai pemilu yang diselenggarakan

berdasarkan *policy* Menteri Dalam Negeri Mr. Soenarjo (dari NU). Pada pemilu ini, NU meraih 45 kursi di parlemen (DPR), tidak jauh selisihnya dari perolehan Masyumi dan PNI yang masing-masing menempatkan 57 wakil di lembaga parlemen.

Kedua, lahirnya PP No. 10 yang isinya membatasi aktivitas ekonomi para pengusaha asing serta bertujuan memproteksi dan mendorong agar para pengusaha pribumi dapat berkembang. PP ini lahir pada saat Departemen Perdagangan dipimpin oleh Menteri dari NU, yaitu Drs. Rahmat Mulyoamiseno. *Ketiga*, gagasan berdirinya masjid Istiqlal oleh KH. A. Wahid Hasyim, selaku Menteri Agama saat itu, dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Adapun pelaksanaannya direalisasikan pada masa Departemen Agama dipimpin oleh menteri dari NU (KH. M. Ilyas). *Keempat*, gagasan pendirian IAIN oleh KH. Wahib Wahab (Menteri Agama saat itu). *Kelima*, realisasi penerjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia (pada masa Depag dipimpin oleh menteri dari NU, Prof. KH. Syaifuddin Zuhri). *Keenam*, penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang diprakarsai oleh Menag dari NU, yaitu K.H. M Dahlan, yang di kemudian hari menjadi acara nasional, silaturrohmi para *qori'* dan *huffadz* se-tanah air.

Ketujuh, penggalan terbentuknya "Kabinet Kaki Empat" (PNI-PKI-Masyumi-NU), perlawanan langsung terhadap aksi-aksi PKI di segala bidang. Ketika Prof. Dr. Hamka dihantam PKI, NU melalui media massa yang dimilikinya, yaitu surat kabar harian *Duta Masyarakat* (Dumas) secara terang-terangan membela Hamka. Puncak dari perlawanan NU terhadap PKI adalah gagalnya G 30 S PKI. NU tercatat sebagai partai politik pertama yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar PKI dibubarkan. Sikap tegas ini dicetuskan oleh NU pada tanggal 5 Oktober 1965 ketika masyarakat Indonesia masih bersikap ragu-ragu tentang siapa yang menjadi arsitek gerakan 30 S/PKI tersebut. Terakhir, *kedelapan*, ketika HMI dan Gasbindo diancam akan dibubarkan oleh pemerintah yang dipengaruhi oleh PKI, Prof KH. Syaifuddin Zuhri (Menteri

Agama ketika itu) membelanya dengan jabatan dirinya sebagai garansinya.

Di sini, patut dicatat bahwa *mode of thought* NU dalam berpolitik adalah menggunakan paradigma politis-ideologis dengan memegang teguh ajaran Islam secara normatif-teologis. Konsekuensi lebih lanjut adalah perilaku politik NU cenderung bersifat eksklusif, terutama bila berhadapan atau dihadapkan pada komunitas nasionalis atau sekuler. Tapi dalam konteks ini, sebagaimana dinyatakan oleh M. Ali Haidar, bahwa konsep Sunnisme yang dianut oleh NU merupakan konsep jalan tengah yang lebih mementingkan harmoni dan kestabilan sosial. Konsep ini pula agaknya yang mendorong NU tampil lebih lentur dan lebih akomodatif.

Hasil pemilu pertama yang dilaksanakan pada 29 September 1955 cukup mengejutkan banyak orang. Bukan cuma karena tidak menunjukkan kemenangan umat Islam, tapi juga menunjukkan perimbangan kekuatan antara dua partai Islam besar, NU dan Masyumi, dan rival mereka, PNI dan PKI. Dari jumlah 30 lebih partai yang ikut, PNI meraih kemenangan dengan suara terbanyak, 22,3 persen dari jumlah politik, Masyumi 20,9 persen, NU 18,4 persen, serta PKI 16,4 persen. Proporsi perolehan suara partai-partai Islam betul-betul berimbang dengan partai-partai nasionalis, komunis, dan Kristen. Hasil pemilu ini membuyarkan harapan partai-partai Islam untuk menang (Hefner, 2000:87).

Putaran kedua pemilu untuk memilih anggota-anggota konstituante pada akhir tahun 1955 juga menunjukkan hasil yang sama, pembagian kekuatan antara kaum nasionalis dan Islam. Konstituante bertugas menyusun UUD yang baru yang akan menggantikan UUDS 1950. Tetapi, konstituante harus memutuskan terlebih dahulu persoalan apakah Indonesia merupakan negara sekuler (*non-religius*) atau negara Islam. Meski konstituante berhasil mencapai sejumlah besar kesepakatan, namun mereka mengalami jalan buntu menyangkut isu hangat tentang Islam dan negara (Hefner, 2000: 86). Menyadari situasi semacam ini, meskipun kelompok

Islam terus berusaha untuk mengesahkan Piagam Jakarta yang merupakan konsensus anggota-anggota BPUPKI sebelum proklamasi kemerdekaan, namun mereka hanya berhasil memperoleh jumlah suara seperti yang mereka peroleh dalam pembahasan mengenai dasar falsafah negara (Baso, 2001: 92).

Sebagai seorang yang gigih membela Pancasila, Presiden Soekarno, didukung oleh Angkatan Bersenjata mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 tentang “kembali ke Undang-Undang Dasar 1945”. Pada saat yang sama, Soekarno juga mengungkapkan konsep “Demokrasi Terpimpin” yang sebenarnya telah direncanakan sejak tahun 1957. Selama periode demokrasi terpimpin (1959-1965), keputusan-keputusan politik, termasuk pengangkatan anggota parlemen ditentukan sendiri oleh Soekarno. Merespons sistem ini, yang sebenarnya tidak sesuai dengan UUD 1945, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) serta beberapa pemimpin politik yang lain menunjukkan oposisi keras mereka. Penentangan ini bahkan membawa sejumlah pemimpin Masyumi dan PSI terlibat dalam pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia), sementara beberapa pemimpin yang lain ambil bagian dalam pendirian Liga Demokrasi (Abdillah, tt: 37).

Banyak di antara mereka yang terlibat, baik dalam pemberontakan maupun gerakan demokrasi, ditangkap dan dipenjara. Di antara para pemimpin yang terlibat dalam pemberontakan adalah Muhammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap. Soekarno tidak hanya memenjarakan para pemimpin Masyumi, namun juga melarang partai ini pada 13 September 1960. Di lain pihak, ia memberi kesempatan yang baik kepada Partai Komunis dan mengumumkan kebijakan tentang Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis). Memang, partai-partai Islam yang lain berpartisipasi dalam Demokrasi Terpimpin, dan beberapa pemimpin mereka diangkat sebagai menteri. Namun demikian, mereka tidak bisa menghindari ketegangan dengan kaum Komunis yang berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara Komunis. Usaha Komunis mencapai puncaknya dengan

gagalnya kudeta Komunis pada 30 September 1965 (Abdillah, tt: 38).

Masa Orde Baru dan awal Reformasi

Gagalnya kudeta tersebut sekaligus mengakhiri masa pemerintahan orde lama yang dipimpin Soekarno. Inilah yang menandai awal pemerintahan rezim orde baru yang dipimpin Soeharto. Masa orde baru ditandai dengan hubungan yang pasang-surut antara Islam dan Negara. Pada masa-masa awal kepemimpinannya, pemerintah orde baru mengkhawatirkan politisasi Islam dan kemampuannya mengerahkan gerakan massa. Bentuk yang paling tampak dari kompetisi politik di bawah orde baru adalah antara pemerintahan militer, yang didominasi oleh kelompok abangan dan kekuatan sipil Islam, yang jauh lebih lemah daripada pemerintah. Walaupun serangan ideologi kuat, tapi kemudian pada akhir tahun 1980-an para aktivis Muslim menunjukkan kepercayaan diri yang baru dengan lahirnya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

ICMI adalah organisasi yang disponsori Soeharto dan dirancang untuk memobilisasi dukungan umat Islam pada saat satu segmen militer menentang Soeharto. Soeharto juga ingin menggunakan ICMI untuk menghadang gerakan pro-demokrasi dengan cara membelanya berdasarkan garis keagamaan. Sekalipun diresmikan dengan irama yang dimainkan oleh presiden, tapi beberapa anggota ICMI ingin 'menari' berdasarkan irama yang dimainkan orang lain. Sejak awal sudah ada ketegangan di tubuh ICMI antara mereka yang ingin memanfaatkan ICMI untuk bekerja sama dengan rezim penguasa dan mereka yang ingin memanfaatkan ICMI untuk proses demokratisasi. Ketegangan ini tampak semakin jelas pada bulan-bulan setelah simposium di Malang dan diperparah oleh adanya perdebatan yang diperbarui mengenai hubungan yang pas antara politik Islam dan demokrasi (Hefner, 2000:223).

Satu-satunya kelompok Islam yang berada di luar jalur struktur kekuasaan yang menentang keberadaan ICMI adalah NU yang diketuai oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dengan

pernyataan yang kritis dan sinis, Gus Dur langsung mengecam ICMI sebagai organisasi sektarian dan melakukan rekonfesionalisasi terhadap politik dan masyarakat (Hefner, 2000:226). Sejak pertengahan tahun 1980-an, Gus Dur sudah mulai mentransformasikan dan memanfaatkan NU sebagai sarana pengembangan masyarakat tingkat bawah (*grassroot*), toleransi dan pluralisme. Wacana yang sedang merebak dalam kelompok ini, bukanlah ideologi, dan kesempurnaan Islam tidak menuntut formalisasi ajaran dalam kehidupan bernegara. Semua kelompok dalam wadah negara kesatuan RI memiliki hak-hak politik, sosial, dan ekonomi yang sama.

Perjuangan kelompok ini pun tidak lagi terarah pada penguasaan birokrasi, tapi lebih pada penguatan-penguatan di tingkat bawah untuk menciptakan *civil society*. Tak heran jika gerakan kelompok ini banyak bersinggungan dengan LSM-LSM, sehingga dalam Islam tradisional ini bisa juga ditemukan unsur-unsur populis-kiri karena kedekatan wacana politik yang dikembangkan oleh kelompok tersebut (Hamdi dkk:1999:21).

Apakah dengan pilihan di atas, persoalan relasi agama dan negara sudah dianggap tuntas? Terbukti, wacana yang merebak pasca runtuhnya orde baru adalah bangkitnya kembali politik aliran berbasis ideologis. Kelompok-kelompok Islam kembali bergeliat mengulang romantisme sejarah masa lalunya dengan mendirikan partai-partai politik yang berbasis aliran keagamaan. Di antaranya, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Masyumi Baru, Partai Keadilan, Partai Umat Muslimin Indonesia, Partai Syariat Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia, Partai Amanat Nasional, PPP, dan beberapa partai dari kelompok NU. Dalam NU sendiri terpolarisasi dalam beberapa partai, di antaranya PKB, PKU, PNU, Partai Sunni. Tetapi partai yang memperoleh basis dukungan konstituen (NU) terbanyak di antara faksi-faksi politik NU tersebut adalah PKB.

Meski ada beberapa partai Islam yang mengklaim sebagai partai yang terbuka (*inklusif*) dan tidak berasaskan Islam,

tetapi kita bisa melihat realitas politik dari kemunculan partai-partai tersebut yang mengaspirasikan satu kepentingan politik dari kelompok Islam tertentu. Apalagi, naiknya Gus Dur ke posisi puncak kekuasaan sebagai Presiden RI beberapa tahun lalu dianggap sebagai perlawanan terhadap kelompok nasionalis sekuler (PDIP), yang kala itu sebenarnya Megawatilah yang lebih berhak menjadi presiden karena memenangkan suara mayoritas pada pemilu 1999. Kita tahu bahwa ketika Gus Dur menjadi presiden berkat dukungan poros tengah yang mayoritas berasal dari partai-partai Islam dan Amien Rais menjadi ketua MPR.

Namun, orang tidak mudah gegabah mengambil kesimpulan bahwa tengah terjadi koalisi yang prinsipil antara Islam tradisional (*asosiasional*) dan Islam modernis (*institusional*). Banyak yang berpendapat bahwa Gus Dur menjadi presiden karena kecelakaan (*by accident*). Megawati tidak bisa diterima oleh kalangan Islam modernis karena ia perempuan, sedang Habibie yang selama ini menjadi kartu mati karena keterkaitannya dengan orde baru. Maka, pilihan 'terpaksa' jatuh ke Gus Dur. Tetapi, nampaknya Gus Dur tidak mampu bertahan lama dari kursi kepresidenannya karena yang justru paling getol menjatuhkan Gus Dur adalah poros tengah itu sendiri. Begitulah dunia politik sehingga benar kiranya jika kamus politik mengatakan bahwa “*tidak ada kawan yang abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan pribadi*”. Tentu saja, kejatuhan Gus Dur tersebut sempat memperparah hubungan politik kelompok Islam tradisional (NU) dan Islam Modernis (Muhammadiyah, Masyumi, dan para *underbow*-nya).

Daftar Rujukan

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna*.
- Hefner, Robert W. 2000. *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia*. Oxford: University Press,
- Hamdi, Ahmad Zainul dkk. 1999. 'Aliran Sungai' Politik Aliran. Surabaya: Jurnal Gerbang, Edisi 1, th. II, Januari-Maret.
- Karim, M. Rusli. 1983. *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surut*. Jakarta: Rajawali,

Maa'rif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Masalah Kenegaraan*.

Noer, Deliar. 1978. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. New York: Oxford University Press.

..... 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Shirasi, Takashi. 1997. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, terj. Hilmar Farid. Jakarta: Garfiti.